

BAB I

PENDAHULUAN

Yunani adalah sebuah negara dengan kekuatan ekonomi kecil di Eropa bagian selatan. Perekonomian Yunani tidak dapat dibandingkan dengan perekonomian negara-negara utama di Eropa, seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Namun faktanya krisis yang dialami oleh Yunani menyebabkan kepanikan dan memaksa negara-negara euro dan IMF turun tangan lebih serius untuk menyelesaikan krisis tersebut. Uni Eropa dan IMF harus menyelamatkan Yunani dengan cara menyediakan dana talangan. Karena jika tidak, krisis Yunani akan berdampak ke negara-negara lain yang ekonominya belum pulih dari krisis.

Krisis keuangan Yunani adalah krisis keuangan yang unik. Krisis ini berasal dari kombinasi antara manajemen yang buruk, belanja pemerintah yang berlebihan, dan penipuan statistik.¹ Ketidakstabilan di sebuah negara kecil di Uni Eropa akan mengganggu stabilitas mata uang euro. Hal ini disebabkan fundamental mata uang euro bergantung pada 16 negara anggotanya.² Untuk mencegah masalah krisis utang Yunani meluas ke negara-negara Eropa lainnya, Uni Eropa didesak untuk segera mengambil tindakan guna memulihkan krisis utang luar negeri Yunani.

¹ "Keuangan Negara Parlemen Yunani Setujui Penghematan", *Kompas*, 8 Mei 2010.

² "Keuangan Negara Parlemen Yunani Setujui Penghematan", *Kompas*, 8 Mei 2010.

Skala ekonomi Yunani memang relatif kecil bila dibandingkan dengan perekonomian negara Eropa lainnya. Namun pengaruh krisis Yunani ini tidak bisa dianggap remeh. Saat ini faktanya krisis Yunani sudah menjalar ke negara Eropa lainnya, seperti Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia. Penyebabnya adalah negara-negara tersebut memiliki masalah yang sama, yaitu pembengkakan defisit fiskal.³

Karena alasan singkat itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dan mengangkat judul **“Krisis Keuangan Yunani dan Upaya Solusi oleh Uni Eropa”** sebagai judul skripsi.

Bagaimana krisis Yunani benar-benar menjadi ancaman serius untuk Uni Eropa dan bagaimana Uni Eropa menyelesaikan krisis tersebut akan menjadi pertanyaan menarik dalam skripsi yang akan diangkat oleh penulis dan kemudian akan penulis teliti lebih lanjut.

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang krisis Yunani dan bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi krisis keuangan tersebut yang telah berdampak terhadap perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa dan juga pada perekonomian global. Peneliti ingin menggambarkan proses pemberian dana talangan Uni Eropa untuk menyelesaikan krisis utang Yunani.

³ *Gelombang Utang Baru Yunani* (diakses 5 Oktober 2010); diunduh dari

B. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan Yunani berawal dari Desember 2009.⁴ Krisis ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika Serikat. Krisis Amerika dipicu oleh krisis perbankan dan lembaga keuangan yang terlalu banyak memberikan kredit perumahan dengan standar rendah dan transaksi derivatif yang sangat besar. Sementara krisis Yunani dipicu oleh krisis utang pemerintah. Sebagai anggota Uni Eropa, Yunani dapat meminjam dengan bunga rendah karena memiliki peringkat utang relatif baik karena ditunjang oleh kekuatan ekonomi Jerman dan Perancis. Hal itulah yang menyebabkan Yunani berani banyak meminjam pada masa lalu untuk membiayai pengeluaran yang terlampau besar.⁵

Krisis Yunani bermula dari ketidakdisiplinan pelaksanaan kebijakan fiskal dan utang swasta. Pinjaman pemerintah Yunani membengkak sejak krisis finansial global pada 2008. Penerimaan pemerintah dari pajak turun karena kemampuan membayar masyarakat dan perusahaan merosot. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah semakin banyak, seperti untuk membiayai tunjangan sosial bagi para pengangguran dan masyarakat miskin yang jumlahnya berlipat ganda.

Pemerintah Yunani sebenarnya sudah mengambil kebijakan suku bunga rendah, namun hal tersebut tetap tidak mampu mendorong meningkatnya angka konsumsi dan juga investasi. Itulah sebabnya

⁴ "Adakah Dampak Krisis Yunani ke Indonesia?", *Kompas*, 31 Mei 2010.

⁵ "Krisis Utang Yunani", *Kompas*, 31 Mei 2010.

perekonomian domestik didorong melalui kenaikan belanja pemerintah. Selain itu juga, ada banyak bank investasi yang membujuk Yunani untuk terus meminjam. Hal ini menyebabkan semakin membesarnya hutang Yunani. Kondisi di Yunani semakin diperparah dengan adanya rekayasa laporan keuangan yang menjadi penyebab peringkat dan harga surat utang Yunani jatuh. Padahal ada banyak bank yang memiliki surat utang pemerintah Yunani tersebut, diprediksi jumlahnya mencapai 429 miliar dollar AS.⁶ Dengan ini, maka dikhawatirkan bank-bank tersebut juga akan mengalami masalah keuangan yang mungkin juga akan menghadapi hal terparah yaitu kebangkrutan.

Selain akibat dampak krisis finansial global, krisis Yunani juga dipicu oleh adanya salah kelolah ekonomi domestik yang menyebabkan membengkaknya utang negara hingga 120 persen produk domestik bruto.⁷ Krisis utang pemerintah yang berawal di Yunani ini kemudian dengan cepat menyebar ke Portugal, Spanyol, Irlandia (bahkan, mungkin Italia) dan beresiko menyeret seluruh perekonomian zona euro dan perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari krisis.

Banyak dugaan bahwa negara-negara Eropa Selatan yang sering disebut sebagai negara PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain) memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu memiliki utang yang besar (Italia 116 persen dari PDB, Spanyol 52 persen PDB, Portugal 75 persen PDB), defisit

⁶ *Ibid*.

⁷ "Dana Talangan untuk Yunani", *Kompas*, 4 Mei 2010.

anggaran yang tinggi, dan terperangkap dalam euro yang terlalu kuat. Kesamaan karakteristik itulah yang mengkhawatirkan banyak pihak, bukan karena Yunani merupakan negara kecil sehingga harus diselamatkan dengan berbagai cara tetapi kesamaan karakteristik itulah yang berbahaya karena ekonomi Spanyol (PDB 1464 miliar dollar AS) dan Italia (PDB 2118 miliar dollar AS) jauh lebih besar daripada Yunani. Sebelum krisis Yunani, euro terlalu kuat, pernah mencapai 1,5 dollar AS/euro sehingga membuat negara-negara Eropa yang ekonominya relatif lemah semakin tidak kompetitif. Memiliki mata uang yang kuat memang membanggakan, tetapi jika uang kuat sebelum waktunya dan tidak didukung oleh fundamental, hal ini justru sangat merugikan. Dilema itulah yang dihadapi oleh negara-negara PIGS.⁸

Fundamental ekonomi merupakan dasar yang dijadikan acuan dalam melihat profil ekonomi suatu negara. Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi fundamental ekonomi suatu negara, diantaranya total pendapatan negara (GDP), inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ratio hutang terhadap GDP, surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, neraca pembayaran, dan neraca perdagangan.⁹ Dalam hal ini, kelemahan fundamental ekonomi Yunani dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah Yunani tidaklah seimbang dimana pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan pemerintah (lihat Lamp. 5). Sedangkan tingginya nilai euro akan menyebabkan harga produk yang

⁸ "Krisis Utang Yunani", *Kompas*, 31 Mei 2010.

⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hal. 18.

dihasilkan oleh Yunani juga akan meningkat sehingga permintaan akan produk tersebut dari pasar internasional akan menurun. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadinya defisit neraca pembayaran dimana nilai ekspor lebih kecil dibandingkan dengan nilai impor. Defisit neraca pembayaran tersebut ditambah dengan menurunnya pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak akan mempengaruhi pendapatan nasional pemerintah Yunani yang akan semakin memperburuk perekonomian Yunani.

Krisis keuangan yang terjadi di Yunani ini kemudian mempunyai potensi merambat ke seluruh perekonomian Uni Eropa. Perambatan itu didukung oleh adanya fakta bahwa obligasi pemerintah Yunani sudah menyebar merata ke seluruh masyarakat dan institusi finansial Eropa. Krisis Yunani dan sejumlah negara zona euro lainnya sebenarnya dapat menjadi ujian bagi kredibilitas sistem mata uang tunggal Eropa. Krisis Yunani juga dipastikan akan mengakibatkan kontraksi tajam perekonomian negara itu dan berdampak pada pemulihan ekonomi di zona euro serta perekonomian global secara keseluruhan.

Dalam hal ini, Uni Eropa tidak mungkin melakukan penyalangan dengan cepat karena belum ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Selain itu juga, Yunani tidak mungkin melakukan devaluasi mata uang ataupun keluar dari keanggotaan zona euro.¹⁰ Disinilah keterlibatan Uni Eropa yang besar dibutuhkan untuk mencari jalan keluar yang tepat untuk mencegah krisis

hutang Yunani tersebut meluas ke negara Eropa lainnya yang keuangannya juga lemah.

Untuk mencegah meluasnya krisis ini, Uni Eropa dan IMF telah bersepakat untuk memberikan dana talangan kepada Yunani untuk membayar hutangnya yang mencapai 406 miliar dollar AS. Namun, untuk memperoleh pinjaman darurat dari Uni Eropa dan IMF, Yunani harus mengambil kebijakan penghematan anggaran sebagai syarat untuk memperoleh dana talangan sebesar 110 miliar euro (setara dengan US\$ 145 miliar atau Rp. 1.330 triliun).¹¹ Kesepakatan yang diambil oleh Uni Eropa pada tanggal 2 Mei 2010 tersebut bertujuan untuk membantu Yunani dan mencegah krisis merembet ke kawasan Eropa lainnya.

Penyelamatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan IMF ini diharapkan akan memulihkan kepercayaan, keamanan, dan stabilitas keuangan Yunani serta Uni Eropa yang tergoyah akibat terjadinya krisis ini. Perekonomian dunia yang juga terkena dampak dari krisis ini juga berharap dengan dilakukannya kebijakan tersebut maka krisis ini akan segera tertangani agar tidak menyebarkan dampak yang lebih besar lagi.

Penghematan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Yunani untuk memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Uni Eropa ini kemudian menimbulkan banyak kerusuhan di dalam negeri. Kemarahan warga Athena diluapkan dengan menggelar demonstrasi pada tanggal 4 Mei 2010 yang

¹¹ *Gelimang Utang Baru Yunani* (diakses 5 November 2010); diunduh dari http://majalah.tempointeraktif.com/id/emin/2010/05/31/EB/mbm_20100531_EB133673_id.html

berakhir pada kerusuhan yang memakan tiga korban jiwa. Para demonstran tersebut menolak pengurangan besar-besaran anggaran pemerintah Yunani yang melakukan pemangkasan terhadap berbagai beban anggaran yang memberatkan, seperti memotong bonus dan dana pensiun untuk pegawai pemerintah, menaikkan usia pensiun bagi perempuan menjadi berusia 65 tahun, memotong biaya pelayanan publik, dan lain-lain. Demonstrasi besar-besaran ini dimotori oleh serikat kerja pemerintah dan swasta terbesar Yunani, yaitu ADEDY dan GSEE. Aksi unjuk rasa ini melibatkan petugas lalu lintas udara, petugas pajak dan bea-cukai, masinis, dokter, guru, hingga wartawan. Jerman yang dalam hal akan menjadi donatur terbesar untuk menutupi krisis hutang Yunani juga telah memperingatkan bahwa jika Yunani tidak mengikuti rencana penghematan tersebut, Jerman dapat menghentikan bailout yang telah disepakati.¹² Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Yunani berada dalam dilema yang besar antara mengikuti keinginan rakyatnya yang ingin mengembalikan kebijakan yang lebih populer atau mengikuti keinginan para donatur Uni Eropa yang menginginkan kebijakan anggaran yang lebih ketat.

Melihat bahaya yang akan terjadi apabila krisis ini tidak diatasi dengan segera, UE telah berkomitmen untuk mengambil tindakan yang tepat dan tegas agar krisis ini dapat diatasi. Tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah meluasnya krisis tersebut ke negara-negara anggota UE lainnya yang juga akan berdampak pada perekonomian global.

¹² *Apakah Krisis Hutang Yunani Berpotensi Memicu Krisis Ekonomi Global?* (diakses 20 Oktober 2010); diunduh dari http://www.indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236:apakah-krisis-hutang-yunani-berpotensi-memicu-krisis-ekonomi-global&catid=1:latest-news&Itemid=50

Bagaimana kebijakan yang diambil Uni Eropa dalam menghadapi krisis Yunani inilah yang menjadi pertanyaan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui “Bagaimana proses pembuatan kebijakan pemberian dana talangan Uni Eropa tahun 2009-2010 terhadap krisis ekonomi di Yunani ?”

D. Kerangka Dasar Teori

Dalam menganalisa permasalahan yang peneliti angkat, yaitu tentang Bagaimana Kebijakan Uni Eropa dalam Memberikan Dana Talangan untuk Menyelamatkan Ekonomi Yunani, peneliti akan menggunakan Teori Neoliberal Institutionalisme sebagai alat analisa dalam menjelaskan permasalahan tersebut.

Teori Neo-liberal Institutionalisme

Teori Neo-Liberal Institutionalisme memandang bahwa regionalisme merupakan suatu respons negara-negara terhadap berbagai permasalahan yang diciptakan oleh interdependensi regional dan menekankan peran kritis dari institusi-institusi dalam menghadapi dan mengembangkan kohesi regional.

rasionalitas, tujuan kesejahteraan, pengetahuan secara ilmiah dan praktis, serta pandangan pluralis mereka tentang masyarakat internasional.¹³

Robert O Keohane, sebagai tokoh yang menjelaskan pemahaman Neo-liberal Institutionalisme, memberikan penekanan pada adanya pemahaman institusionalisasi dalam politik internasional, bahwa tidak hanya pemerintah sebagai partikel utamanya, namun lebih daripada itu, bahwa dunia politik tersebut sebenarnya lebih terinstitusionalisasi. Yang berarti bahwa, perilaku-perilaku yang ada dalam dunia politik akhirnya akan berefleksi membentuk aturan-aturan, norma, dan konvensi, yang kemudian artinya tersebut diinterpretasikan dalam kesepakatan.¹⁴

Kerjasama negara-negara dalam sistem internasional yang anarki dalam wadah institusi internasional menjadi kajian pokok dari teori ini. Kaum neoliberal memandang adanya sebuah institusi ditujukan sebagai mediator atau perantara untuk mencapai kerjasama di antara aktor dalam sistem internasional. Karena kompleksitas dan intensitas hubungan antar negara yang semakin tinggi, maka berbagai permasalahan pun kerap kali muncul. Hal itu ditambah lagi dengan adanya kepentingan yang beragam dari setiap negara yang memungkinkan terjadinya persinggungan kepentingan yang bisa berujung pada terjadinya konflik. Oleh karena itulah peran sebuah institusi

¹³ Nuraini S, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 52-53.

¹⁴ Robert Keohane, *Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics*, in *International Institutionalism*, (Stanford, California: Westview Press, 1989) hal. 1.

menjadi sangat penting dalam rangka menjamin terjalannya kerjasama atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.

Neo-liberal Institusionalisme dalam melihat tumbuh dan berkembangnya regionalisme, memiliki beberapa argumen pokok. *Pertama*, dengan semakin tinggi interdependensi, maka akan semakin tinggi pula tuntutan untuk melakukan kerjasama. Institusi-institusi dianggap mampu memberikan penyelesaian terhadap berbagai jenis permasalahan secara kolektif. Seperti menurut Robert Keohane :

Kaum institusionalis tidak mengangkat rezim internasional pada posisi mitos tentang otoritas yang melampaui negara, sebaliknya rezim-rezim tersebut ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dalam menghadapi dilema tentang koordinasi dan kolaborasi di bawah kondisi interdependensi, pemerintah-pemerintah menuntut institusi-institusi internasional yang memungkinkan mereka mencapai kepentingan mereka melalui tindakan kolektif terbatas.¹⁵

Kedua, pandangan Neo-liberal Institusioanal sangatlah state sentris. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai aktor yang dominan dalam memainkan peran sebagai pembuat keputusan.

Ketiga, institusi-institusi itu mempunyai arti atau penting eksistensinya, karena ada keuntungan yang mampu mereka berikan, serta pengaruh mereka terhadap para aktor lain. Keuntungan tersebut bisa berupa

¹⁵Robert O. Keohane, *Institutionalist Theory and the Realist Challenge After the Cold War*, dalam Baldwin (ed.), *Neorealism and Neoliberalism*, dalam Fawcett and Hurrell, 1995: 61, dalam Fawcett dan Hurrell, 1995: 62, dalam Nuracini, Silvy, Sudirman, *op.cit*, hal. 55.

ketentuan informasi, transparansi dan monitoring, pengurangan biaya transaksi, pengembangan ekspektasi yang sama, dan memfasilitasi penggunaan produktif dari berbagai strategi yang terkait dengan isu-isu yang dihadapi bersama.

Dalam perspektif Neo-liberal Institusionalisme ini, Keohane juga menekankan bahwa perilaku negara atau negara bertindak tergantung dalam tahapan pertimbangan, disaat institusi itu dibentuk ataupun disusun, dikembangkan dan diperluas, dimana melibatkan :¹⁶

1. Perputaran informasi dan kesempatan melakukan negosiasi

Dalam hal ini Keohane menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari institusionalisasi tersebut adalah untuk menyimpan dan mengirimkan informasi yang mampu mengurangi ketidakpastian karena ia merupakan hal yang berubah-ubah.¹⁷ Sedangkan arti negosiasi yang peneliti kutip dari buku karangan S.L. Roy, melakukan negosiasi dalam hal ini tidak selalu berarti bahwa suatu usaha yang sedang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan satu sama lain meskipun ini sering dijadikan motif utama dari suatu pertemuan yang diatur antara para diplomat dan negarawan. Namun negosiasi juga dapat ditemukan dalam pertemuan-pertemuan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral.¹⁸ Dalam hal menjawab rumusan masalah yang peneliti ajukan, upaya Uni Eropa dalam

¹⁶Keohane, *op.cit*, hal. 2.

¹⁷*Ibid*, hal. 12.

¹⁸S.L. Roy, *Business and Politics in the World*, PT Rajagrafindo Persada, 1995, hal. 4.

menciptakan perputaran informasi dibuktikan dengan dilakukannya pertemuan-pertemuan guna membahas permasalahan krisis keuangan Yunani ini. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri keuangan zona euro ini diadakan dengan tujuan untuk membahas krisis utang Yunani dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat guna menyelesaikan krisis tersebut.¹⁹

2. Kemampuan aktor untuk mengawasi tingkat kepatuhan (*the compliance*) aktor-aktor lainnya dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Setelah mendapatkan hasil dari perputaran informasi diantara aktor, dihasilkan lah beberapa keputusan atau komitmen yang harus dijalankan oleh aktor lainnya. Dengan adanya institusi tersebut, maka aktor-aktor yang terlibat di dalam proses institusionalisasi memiliki kemampuan untuk mengawasi tingkat kepatuhan negara-negara lain dengan kekuatan yang mengikat agar aktor-aktor lainnya patuh dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Dalam hal upaya Uni Eropa dalam penguatan institusi ini paska terjadinya perputaran informasi yang didorong oleh Uni Eropa pada pertemuan-pertemuan yang digelar dengan tujuan mendapatkan solusi yang tepat guna menyelesaikan krisis Yunani, maka Uni Eropa memiliki kemampuan untuk mengawasi aktor lainnya untuk patuh dalam menjalankan segala keputusan yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan tersebut.

3. Ekspektasi terhadap perjanjian internasional yang solid.

¹⁹ *Eropa Diskusikan Krisis Yunani* (diakses 20 Oktober 2010); diunduh dari <http://www.kompas.com/kompas/bisnis/2010/04/11/eropa-diskusikan-krisis-yunani/>

Teori ini tidak menyatakan bahwa perjanjian itu dapat dibuat dengan mudah. Namun, teori ini mengungkapkan bahwa dengan adanya sebuah perjanjian, hal ini akan mampu mengakomodir negara untuk dapat berkomunikasi dan berkoordinasi sesuai dengan institusi yang mereka buat dengan ragam sejarah dan isu-isu yang ada, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mereka gabungkan dan dalam hal sejauh mana aturan-aturan yang sudah mereka tentukan dipatuhi secara rutin.²⁰

Aransemen institusional ini lah yang menjadi proses penting dalam institusionalisasi, dimana proses ini mampu mempengaruhi perilaku-perilaku negara dalam bertindak. Hal tersebut disebabkan karena terdapat dua kondisi penting yang ada dalam aransemen institusional, dan dua kondisi ini lah yang harus ada agar Neo-liberal Institusionalisme relevan dalam sistem internasional. Yang pertama, apabila aktor-aktor yang terlibat dalam proses aransemen institusional itu memiliki kepentingan yang sama (*mutual interest*), dimana mereka harus mendapat keuntungan dari kerjasama yang mereka ciptakan. Kedua, adalah dalam kondisi dimana terdapat perbedaan pandangan tentang proses institusionalisasi yang ada, dimana perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu proses pembagian informasi yang akan memberikan pengaruh pada negara dalam menentukan sikap. Jika institusi-institusi dalam dunia politik itu ditetapkan, hal tersebut akan menjadi tak ada artinya dalam

menekankan perbedaan-perbedaan pandangan dalam institusionalisasi untuk menjelaskan ragam perilaku aktor.²¹

Secara prinsip, perspektif Neo-liberal Institutionalisme menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan disaat terjadinya aransemen institusional di dalam dunia politik, akan memberikan pengaruh penting pada tindakan-tindakan negara. Dimana persamaan-persamaan dan pertentangan itu akan membantu institusi untuk menjelaskan arti dan kepentingan negara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai bagaimana paham Neo-liberal Institutionalisme tentang institusionalisasi, dan pengaruh institusionalisasi pada perilaku negara, Keohane mendefinisikan institusi internasional sebagai seperangkat peraturan (formal dan informal) yang saling berhubungan dan berkesinambungan yang akan menjelaskan pola tingkah laku negara, aktivitas yang memaksa, dan bentuk-bentuk harapan. Institusi internasional -sebagaimana penjelasan di atas- dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk di bawah ini²² :

- a. Organisasi (baik organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah)

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Yang dibentuk oleh negara dengan sengaja agar dapat mengawasi dan bereaksi terhadap tindakan-tindakan dan tujuan yang telah disepakati

oleh mereka. Organisasi merupakan sebuah institusi yang bersifat

birokratis, dengan aturan-aturan yang jelas dan tugas-tugas yang spesifik untuk mengatur individu dan kelompok.

b. Rezim Internasional

Rezim adalah institusi dengan aturan-aturan yang jelas yang telah disepakati oleh pemerintah dalam pembentukannya yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu dalam hubungan internasional. Contohnya rezim moneter internasional yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rezim Hukum Laut yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1970-an.

c. Konvensi

Konvensi merupakan institusi informal dengan aturan-aturan yang implisit yang menentukan ekspektasi aktor. Meski konvensi tidak memiliki aturan-aturan yang eksplisit, namun ia mampu membuat aktor saling memahami antara satu dengan yang lainnya dalam mengkoordinasikan perilaku di antara mereka.

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, yaitu tentang “Bagaimana proses pembuatan kebijakan pemberian dana talangan Uni Eropa untuk menyelamatkan perekonomian Yunani pada tahun 2009-2010”, teori ini relevan dengan permasalahan tersebut. Krisis Yunani adalah suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dan juga pada perekonomian dunia.

Sesuai dengan perspektif ini yang menyatakan bahwa perilaku aktor atau perilaku negara bertindak pada tahapan pertimbangan disaat institusi itu dibentuk ataupun disusun, dikembangkan dan diperluas, dimana terjadi perputaran informasi dan kesempatan melakukan negosiasi, aktor-aktor mengawasi tingkat kepatuhan aktor-aktor lainnya terhadap kesepakatan pembentukan institusi dan ekspektasi terhadap kesepakatan internasional yang solid, maka dalam menghadapi krisis keuangan Yunani, Uni Eropa telah menetapkan kebijakan untuk melakukan program bantuan ekonomi terhadap Yunani dengan memberikan dana talangan agar Yunani dapat melunasi hutang-hutangnya. Kronologi pemberian dana talangan ini diawali ketika Yunani meminta bantuan ekonomi kepada negara anggota zona euro dan IMF pada tanggal 23 April 2010. Pada tanggal 2 Mei 2010, tim gabungan dari Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF melakukan kunjungan ke Yunani untuk membicarakan kebijakan paket bantuan untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan menyokong pertumbuhan jangka panjang. Akhirnya, perjanjian kebijakan paket bantuan disepakati, dimana Yunani akan menerima dana talangan sebesar 110 miliar euro yang akan diberikan dalam periode 2010-2013. Pada saat itu juga negara-negara anggota zona euro menyepakati program kebijakan dan menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar 80 miliar euro. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2010, IMF setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 30 miliar euro kepada Yunani. Selain itu juga pada tanggal 9-10 Mei 2010, Dewan dan negara-negara anggota Uni Eropa mengesahkan sebuah Mekanisme Stabilisasi Finansial Eropa. Pada tanggal 18

Mei 2010, negara-negara anggota zona euro menyerahkan paket bantuan pertama sebesar 14.5 miliar euro.²³ Dalam pemberian dana talangan tersebut, Uni Eropa mengharuskan Yunani untuk melakukan penghematan pengeluaran pemerintah. Kebijakan Uni Eropa untuk memberikan dana talangan kepada Yunani ini ditujukan guna mencegah menularnya krisis tersebut ke negara-negara Uni Eropa lainnya.

E. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti akan memberi batasan jangkauan penelitian, yaitu sejak dimulainya krisis Yunani pada tahun 2009 hingga diambilnya kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan krisis ini pada tahun 2010. Namun tidak menutup kemungkinan data yang penulis gunakan melebihi jangkauan waktu yang difokuskan, yang berfungsi sebagai data tambahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu data yang diolah adalah data sekunder, yang bersumber dari literatur-literatur, media cetak dan tulis yang valid serta informasi-informasi yang peneliti peroleh melalui internet. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori ataupun konsep-konsep yang ditetapkan oleh peneliti.

²³ *The Economic Adjustment Programme For Greece* (diakses 7 Desember 2010); diunduh dari [http://www.efsd.com/efsd/efsd/press/2010/efsd/eng/61_en.pdf](#)

G. Sistematika Penelitian

BAB I **Pendahuluan** yang memuat Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II **Krisis Keuangan Yunani, Langkah-langkah yang telah diambil, dan Dampak Krisis ini.** Dalam bab ini akan digambarkan mengenai penyebab krisis Yunani, langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikannya, dan dampak krisis ini pada perekonomian Uni Eropa dan perekonomian global.

BAB III **Uni Eropa dan Mekanisme Pengambilan Keputusan di Uni Eropa.** Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Uni Eropa, perluasan keanggotaan Uni Eropa, struktur organisasi Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa, dan juga menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan di Uni Eropa.

BAB IV **Proses Penetapan Kebijakan Dana Talangan untuk Mengatasi Krisis Keuangan di Yunani.** Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan Uni Eropa menyelesaikan krisis keuangan Yunani.